

ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, INFRASTRUKTUR, DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN TERHADAP JUMLAH MASYARAKAT SEJAHTERA DI INDONESIA

Winda Novitasari, Muhammad Arif

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*Corresponding Author:
Email: b300190097@student.ums.ac.id

Abstract.

The number of prosperous people is the main problem in every region because the progress of a region can be seen from the number of prosperous people. One of the factors that can hinder the number of prosperous people is the inadequate planning process and inappropriate fund management. This study aims to measure and analyze the effect of government spending in the education, health, infrastructure, and income inequality sectors on the number of prosperous people in 34 provinces in Indonesia in 2018-2021 using panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM) approach. The results of this study indicate that government spending in the health sector has a significant positive effect on the number of prosperous people and government spending on the education sector and income inequality has a significant negative effect on the number of prosperous people while government spending on the infrastructure sector has a positive but not significant effect on the number of prosperous people. In order to increase the number of prosperous people in Indonesia, it is hoped that the government will focus more on improving the quality and quantity of education so that getting jobs will be easier for the people. In addition, government spending should be focused on infrastructure development so that it can attract investors and create many jobs and increase the number of prosperous people.

Kata kunci : *Number of Prosperous People; Education Sector Government Spending; Health; Infrastructure; Income Inequality; Panel Data Regression*

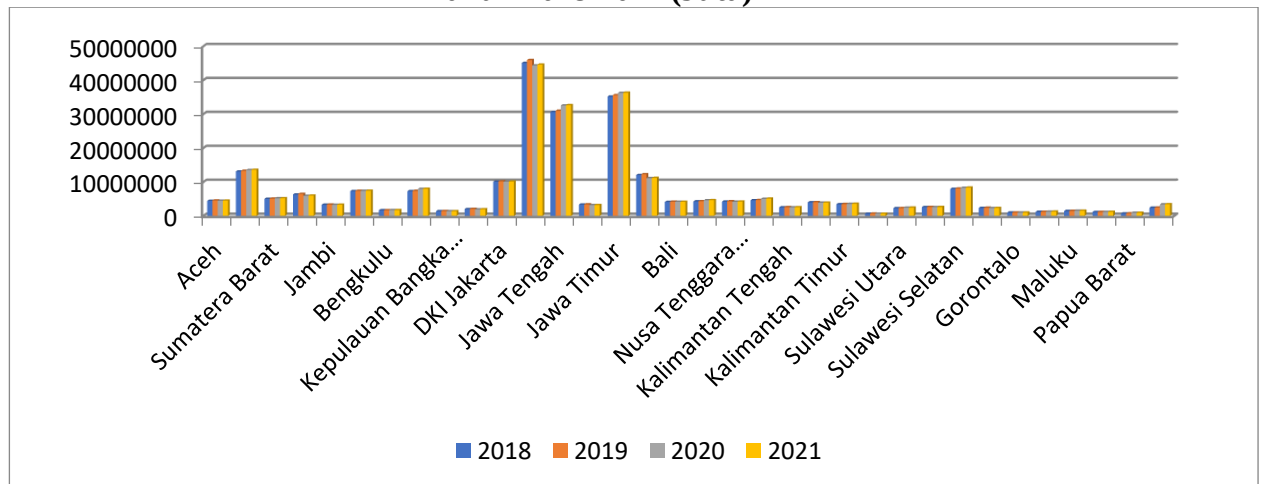
PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan jumlah dari kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan, tingkat kesejahteraan dapat dikatakan relatif karena kesejahteraan seseorang bergantung pada kepuasan mengonsumsi akan pendapatannya. Kesejahteraan masyarakat juga dapat diartikan dengan sebuah kondisi yang menunjukkan keadaan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan di masyarakat tersebut (Badrudin, 2012). Seseorang dapat dikatakan sejahtera jika pada tingkat kebutuhannya secara tidak langsung terpenuhi sesuai dengan indikator kesejahteraan di sebuah negara (Pramata, dkk, 2012). Namun, kesenjangan dalam pendapatan masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan, karena tinggi ataupun rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dapat mempengaruhi kesejahteraan dalam masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengatakan ada delapan faktor untuk mengukur kesejahteraan masyarakat yang mencakup pendidikan, tenaga kerja, kesehatan dan gizi, jumlah penduduk, taraf dan pola konsumsi, kemiskinan, perumahan dan lingkungan, serta indikator sosial lainnya. Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat di Indonesia dengan menyediakan barang-barang publik yang dapat mencerminkan akan kualitas hidup dan keseimbangan di lingkungan masyarakat. Kurangnya penyediaan barang publik akan menghambat prospek pembangunan ekonomi Indonesia, stabilitas ekonomi, dan ancaman terhadap perdamaian dan kemakmuran di Indonesia. Penyediaan akan barang publik juga dapat menjadi salah satu strategi untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil ketika tingkat kesejahteraan masyarakatnya juga meningkat dan semakin membaik. Kesejahteraan masyarakat sama dengan masalah sosial, seperti kemiskinan yang menjadi faktor utama dalam kesejahteraan masyarakat.

Grafik 1
Perkembangan Jumlah Masyarakat Sejahtera di 34 Provinsi Indonesia
Tahun 2018-2021 (Juta)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS, diolah)

Grafik 1 memperlihatkan bahwa selama periode 2018-2021 memiliki jumlah masyarakat sejahtera yang cukup stabil dan diketahui bahwa Jawa Barat memiliki jumlah masyarakat sejahtera yang paling tinggi sedangkan Kalimantan Utara memiliki jumlah masyarakat sejahtera di bandingkan provinsi lainnya. Jumlah masyarakat sejahtera di Jawa Barat tahun 2018 tercatat sebesar 45.067,91 juta jiwa dan Kalimantan Utara memiliki jumlah masyarakat sejahtera sebesar 666,05 juta jiwa. Pada tahun 2019 jumlah masyarakat sejahtera di Jawa Barat sebesar 45.917,54 juta jiwa dan Kalimantan Utara sebesar 639,42 juta jiwa. Namun, saat memasuki tahun 2020 jumlah masyarakat sejahtera di Jawa Barat sebesar 44.353,97 juta jiwa dan pada Kalimantan Timur sebesar 650,01 juta jiwa. Pada tahun 2021 jumlah masyarakat sejahtera di Jawa Barat sebesar 44.587,06 juta jiwa sedangkan pada Kalimantan Utara sebesar 660,74 juta jiwa. Kenaikan akan jumlah masyarakat sejahtera ini dipengaruhi oleh kenaikan yang signifikan terhadap jumlah penduduk maupun jumlah kelahiran yang semakin tinggi dan penduduk miskin yang tinggal di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini akan mengamati pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan, ketimpangan pendapatan, dan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia periode 2018 hingga 2021.

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk dalam jangka waktu panjang yang akan diikuti dengan perbaikan akan sistem kelembagaan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk pembangunan sebuah negara. Ada tiga hal komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi, pertama, akumulasi modal seperti sumber daya manusia, perbaikan pada bidang kesehatan, pendidikan maupun keterampilan kerja, investasi dan sebagainya. Kedua, pertumbuhan akan jumlah penduduk yang akan menyebabkan pertumbuhan pada angkatan kerja. Ketiga, kemajuan akan teknologi dan cara-cara baru untuk menyesuaikan pekerjaan

(Todaro, 2016). Sedangkan menurut (Mirza, 2012) pembangunan merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mencapai dan menunjukkan keberhasilan suatu negara seperti dalam memberdayakan kualitas maupun potensi yang dimiliki oleh negara tersebut. Dalam paradigma pembangunan akan pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dari tingkat kualitas hidup di negara. Sedangkan Meier dan Stiglitz berpendapat bahwa teori pembangunan lebih menekankan pada akumulasi modal di sumber daya manusia dengan menciptakan sebuah pembangunan yang lebih produktif yang melewati kesehatan, pengetahuan, sampai keterampilan dalam masyarakat di sebuah negara.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dalam program-program ini memiliki tujuan yaitu untuk memperbaiki perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hutasuhut, 2005). Kesejahteraan secara umum memiliki arti keadaan makmur, sehat, sejahtera dan keluar dari segala gangguan. Ada banyak cara yang bisa digunakan untuk menentukan kesejahteraan masyarakat, seperti melalui pendapatan perkapita rumah tangga. Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi yang memperlihatkan keadaan masyarakat yang dilihat dari standar kehidupannya (Todaro, 2006).

Pengeluaran pemerintah merupakan semua pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi maupun investasi. Pengeluaran ini meliputi belanja pemerintah atas barang-barang modal, barang konsumsi dan jasa (Sukirno, 2010). Pengeluaran pemerintah merupakan sebuah bagian dari kebijakan fiskal yang merupakan sebuah tindakan pemerintah untuk mengatur perekonomian dengan membuat anggaran dasar yang berupa penerimaan maupun pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk nasional sedangkan untuk daerah atau regional dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 66 ayat 1, menyatakan bahwa keuangan daerah harus dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan bermanfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan pendekatan atas kinerja yang meninjau pada output dengan menggunakan konsep *value of money* (nilai uang) dengan prinsip *good government* (pemerintah yang baik). Pengelolaan anggaran ini juga dapat diartikan dengan sebuah tindakan untuk menyeimbangkan berbagai kebutuhan seperti kebutuhan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mencukupi kebutuhan dan pembiayaan pada sektor publik dengan cara pemerintah yang mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pemerintah. Sehingga otonomi daerah akan mampu untuk mencukupi kebutuhan atas pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan bahwa penngeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan sebuah upaya untuk memenuhi suatu hak dasar untuk rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan

dan prioritas kesehatan juga harus dipandang sebagai sebuah investasi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Pembangunan manusia melihat manusia dari sisi kesehatan yang dimana kesehatan merupakan faktor penting untuk mempengaruhi sumberdaya manusia, dengan berbagai gejala seperti kekurangan gizi, kalori, serta rendahnya kesehatan masyarakat yang akan menghasilkan kualitas dan mental manusia. Maka dari itu, pemerintah harus memiliki anggaran khusus untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara (Astri, Nikensari and Kuncara W., 2013). Infrastruktur juga memiliki beberapa subsektor antara lain yaitu infrastruktur dalam bentuk transportasi maupun perumahan yang merupakan salah satu hal penting untuk menunjang kehidupan masyarakat di negara tersebut.

Ketimpangan pendapatan merupakan sebuah ketidakseimbangan akan pendapatan pada masyarakat. Ketidakseimbangan ini akan memberikan efek negatif kepada para pelaku ekonomi yang akan berakibat pada melakukan sebuah tindakan yang akan mengganggu stabilitas ekonomi, seperti menekan nilai kurs rupiah. Jika nilai ketimpangan tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi yang akan berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi juga dan akan terjadi krisis. Sedangkan perekonomian dapat dikatakan berhasil maju yaitu dengan nilai ketimpangan yang relatif rendah yang dapat diartikan sebagai perkembangan ekonomi juga melibatkan peran semua masyarakat di negara tersebut (Juoro, 2013).

Ketimpangan pendapatan dapat diukur dengan gini ratio. dari segi penyebabnya kesenjangan distribusi pendapatan di suatu negara yang berkembang dapat disebabkan oleh pendapatan perkapita, tidak meratanya pembangunan antar daerah, investasi, dan inflasi yang dimana pendapatan bertambah akan tetapi tidak diikuti dengan penambahan akan barang-barang produksi (Suryana, 2009). Ketimpangan pendapatan terjadi karena beberapa faktor seperti ketimpangan distribusi pendapatan, disparitas upah, maupun globalisasi. Penyebab utama dari ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pengeluaran yaitu ketimpangan kesempatan seperti pendidikan yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan dalam jangka waktu yang panjang (Petcu, 2014)

Ketimpangan pendapatan merupakan sebuah masalah yang sering terjadi di setiap negara dan sering menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi sehingga ketimpangan pendapatan menjadi masalah yang sangat serius jika ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Jika ketimpangan pendapatan menurun maka akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat juga. Ketimpangan pendapatan sering terjadi karena beberapa faktor seperti ketimpangan distribusi pendapatan, disparitas upah, maupun globalisasi (Petcu, 2014). Penyebab utama dalam ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pengeluaran yaitu ketimpangan kesempatan seperti pendidikan yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan dalam jangka waktu yang panjang (Dartanto & Putra, 2018).

(Fadliyah and Triani, 2019), menggunakan analisis regresi data panel menemukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia dengan koefisien regresi sebesar 0,046 dan 0,215 dengan signifikansi empirik t sebesar 0,088 ($<0,10$). Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan rakyat dengan koefisien regresi sebesar 0,210 dan signifikan empirik t sebesar 0.004 ($<0,10$). *Fixed Effect Model* (FEM) terpilih sebagai model terestimasi terbaik.

(Aditia and Dewi, 2018), menggunakan analisis regresi linier berganda menemukan bahwa nilai pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, nilai pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan nilai pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan indikator nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota di Bali dengan koefisien regresi sebesar 0,005, 0,009, 0,009 dan signifikansi empirik t sebesar 0,000 ($<0,05$), 0,017 ($<0,05$), 0,000 ($<0,05$).

(Sope, Koleangan and Wauran, 2019), menggunakan analisis regresi berganda menemukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan secara bersama-sama berpengaruh secara positif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara dengan koefisien regresi sebesar 0,009 dan 0,034 dan signifikansi empirik t sebesar 0,036 (0,05) dan 0,000 ($<0,05$).

Di 23 kabupaten di Aceh periode 2008 hingga 2011 dengan menggunakan analisis regresi data panel, variabel belanja pemerintah sektor pendidikan ditemukan berpengaruh positif terhadap pendapatan perkapita, dengan tingkat pengaruh 0,046, dengan tingkat signifikansi empirik t 0,000 ($<0,05$). Sementara variabel belanja pemerintah sektor kesehatan berpengaruh terhadap variabel pendapatan perkapita, namun tidak signifikan dengan tingkat signifikansi empirik 0,26 ($>0,05$). Model terpilih yaitu *Random Effect Model* (REM). (Aidar and Muhajir, 2014).

Selama periode waktu 2012-2017 dengan menggunakan analisis regresi data panel, di Indonesia, variabel rata rata lama sekolah dan upah minimum ditemukan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan masing-masing dengan koefisien regresi sebesar -0,031 dan -0,039, serta signifikansi empirik t sebesar 0,053 ($<0,10$) dan 0,00 ($<0,10$). Sementara variabel belanja modal berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien regresi sebesar 0,009, serta signifikansi empirik t sebesar 0,012 ($<0,10$). *Random Effect Model* (REM) terpilih sebagai model terestimasi terbaik. (Anshari, Azhar and Ariusni, 2018).

(Mahendra, 2020), menggunakan analisis regresi berganda menemukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan, inflasi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia dengan koefisien regresi sebesar -6,121, 2,313 dengan signifikansi empirik t sebesar 0,00 ($<0,05$), 0,034 ($<0,05$). Sedangkan kemiskinan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia dengan koefisien regresi sebesar 0,981 dengan signifikansi empirik t sebesar 0,341 ($>0,05$).

(Safitri, 2016), menggunakan analisis analisis regresi data panel menemukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dengan hasil koefisien regresi sebesar 2,636, 0,489, 0,148 dengan signifikansi empirik t sebesar 0,000 ($<0,05$), 0,215 ($>0,05$), 0,543 ($>0,05$). *Random Effect Model* (REM) terpilih sebagai model terestimasi terbaik.

(Mogan, 2019) menggunakan analisis regresi data panel menemukan bahwa presentase belanja pemerintah pusat di bidang pendidikan dari PDRB, presentase belanja pemerintah daerah bidang pendidikan dari PDRB kuadrat, presentase belanja pemerintah daerah di bidang kesehatan dari PDRB, presentase belanja pemerintah pusat di bidang kesehatan dari PDRB kuadrat, presentase belanja pemerintah daerah di bidang kesehatan dari PDRB kuadrat berpengaruh negatif terhadap Indeks pembangunan manusia dengan hasil koefisien regresi sebesar -0,578, -0,253, -1,437, -2,678, -0,054 dengan signifikansi empirik t sebesar 0,17 ($>0,10$), 0,17 ($>0,10$), 0,00 ($<0,10$), 0,14 ($>0,10$), 0,12 ($>0,10$).

presentase belanja pemerintah daerah di bidang pendidikan dari PDRB, presentase belanja pemerintah pusat di bidang pendidikan dari PDRB kuadrat, presentase belanja pemerintah pusat di bidang kesehatan dari PDRB, presentase belanja pemerintah pusat di bidang fasilitas umum dari PDRB, n presentase belanja pemerintah daerah di bidang fasilitas umum dari PDRB terhadap indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dengan koefisien regresi sebesar 0,634, 0,007, 4,349, 1,456, 0,128 dengan signifikansi empirik t sebesar 0,046 ($<0,10$), 0,92 ($<0,10$), 0,007 ($<0,10$), 0,007 ($<0,10$), 0,32 ($>0,10$). *Random Effect Model* (REM) terpilih sebagai model terestimasi terbaik.

(Hindun, Soejoto and Hariyati, 2019), menggunakan analisis regresi data panel menemukan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien regresi sebesar -0,021 dan signifikansi empirik t sebesar -0,0008 ($<0,05$). Kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien regresi sebesar 0,029 dengan signifikansi empirik t sebesar 0,046 ($<0,05$). Pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dengan koefisien regresi sebesar 0,531 dengan signifikansi empirik sebesar 0,005 ($>0,005$). *Random Effect Model* (REM) terpilih sebagai model terestimasi terbaik.

(Putri, Anis and Triani, 2019), menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah dan infrastruktur jalan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia tahun 1988-2017 dengan koefisien regresi sebesar 0,045 dan 1,026 dengan signifikansi empirik t sebesar 0,01 ($<0,05$) dan 0,00 ($<0,05$). Ketenagakerjaan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan koefisien regresi sebesar -0,005 dan signifikansi empirik t sebesar 0,04 ($<0,05$).

(Illahi and Ariusni, 2020), menggunakan analisis regresi linier berganda menemukan bahwa ketersediaan listrik, kesediaan air bersih, dan sanitasi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan koefisien regresi sebesar 0,196, 0,219, 0,226 dengan signifikansi empirik t sebesar 0,0002 ($<0,05$), 0,000 ($<0,05$), 0,000 ($<0,05$). Status kepemilikan rumah berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan koefisien regresi sebesar -0,138 dengan signifikansi empirik t sebesar 0,05 ($<0,10$).

(Sholihah and Kustanti, 2017), menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan koefisien regresi sebesar -0,840 dan 1,569 dengan signifikansi empirik t sebesar 0,439 ($>0,05$) dan 0,177 ($>0,05$).

(Fadilah, Ananda and Kaluge, 2018), menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan 3 data dependen menemukan bahwa pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan, dan pengeluaran pemerintah untuk fungsi perumahan dan fasilitas umum berpengaruh terhadap indeks pendidikan dengan koefisien regresi sebesar 0,006, 0,030 dengan signifikansi empirik t sebesar 0,05 ($<0,05$) dan 0,00 ($<0,05$). *Fixed Effect Model* (FEM) terpilih sebagai model terestimasi terbaik. Pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan, dan pengeluaran pemerintah untuk fungsi perumahan dan fasilitas umum berpengaruh terhadap indeks kesehatan dengan koefisien regresi sebesar 0,005, 0,000 dengan signifikansi empirik t sebesar 0,00 ($<0,05$) dan 0,99 ($<0,10$). *Random Effect Model* (REM) terpilih sebagai model terestimasi terbaik. Pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan, dan pengeluaran pemerintah untuk fungsi perumahan dan fasilitas umum berpengaruh terhadap indeks ekonomi dengan koefisien regresi sebesar 0,008,

0,019 dengan signifikansi empirik t sebesar 0,05 ($<0,05$) dan 0,00 ($<0,05$). *Fixed Effect Model* (FEM) terpilih sebagai model terestimasi terbaik.

(Tjodi, Rotinsulu and Kawung, 2018) menggunakan analisis regresi jalur (*Path Analysis*) menemukan bahwa Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien regresi sebesar 0,046, 0,066, 0,042 dengan signifikansi empirik t sebesar 0,000 ($<0,05$), 0,008 ($<0,05$), 0,034 ($<0,05$).

Selama periode 2012-2018 dengan menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*), di Bali, variabel pendidikan pengaruh, pertumbuhan ekonomi ditemukan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat masing-masing dengan koefisien regresi sebesar 0,82 dan 0,178, serta signifikansi empirik sebesar 0,00 ($<0,05$) dan 0,016 ($<0,05$). Sementara variabel disparitas pendapatan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan koefisien regresi sebesar -0,151, serta signifikansi empirik t sebesar 0,031 ($<0,05$). (Wiriana and Kartika, 2018).

(Rakhmawati & Atikah, 2019), menggunakan analisis regresi *Ordinary Least Square* (OLS) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah dan infrastruktur jalan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia tahun 1988-2017 dengan koefisien regresi sebesar 0,045 dan 1,026 dengan signifikansi empirik t sebesar 0,01 ($<0,05$) dan 0,00 ($<0,05$). Ketenagakerjaan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan koefisien regresi sebesar -0,005 dan signifikansi empirik t sebesar 0,04 ($<0,05$).

(Arif & Wicaksani, 2017), menggunakan analisis regresi data panel menemukan bahwa indeks pembangunan manusia dan jumlah tenaga kerja berpengaruh positif terhadap indeks gini di provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015 dengan koefisien regresi sebesar 0,005 dan 0,032 dengan signifikansi empirik t sebesar 0,00 ($<0,05$), 0,32 ($>0,05$). Sedangkan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap indeks gini dengan koefisien regresi sebesar -0,0013, dan -0,0321 dengan signifikansi empirik t sebesar 0,28 ($>0,05$), dan 0,32 ($>0,05$). *Random Effect Model* (REM) terpilih sebagai model terestimasi terbaik.

(Didit & Pratama, 2018), menggunakan analisis regresi *Ordinary Least Square* (OLS) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia dengan koefisien regresi sebesar -2,565 dengan signifikansi empirik t sebesar 0,0962 ($<0,10$),. Sedangkan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia dengan koefisien regresi sebesar 2,708 dengan signifikansi empirik t sebesar 0,0653 ($<0,10$).

(Fiuna, Susetyo and Yunisyita, 2017), menggunakan analisis regresi data panel menemukan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia dengan koefisien regresi sebesar 0,000182, 0,001176 dengan signifikansi empirik sebesar 1,080 ($>0,05$), 0,005 ($<0,05$). Sedangkan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia dengan koefisien regresi sebesar -0,000329 dengan signifikansi empirik t sebesar 0,683 ($>0,05$). *Random Effect Model* (REM) terpilih sebagai model terestimasi terbaik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan model ekonometrika sebagai berikut:

$$\text{Log } JMS_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log } PPSP_{it} + \beta_2 \text{Log } PPSK_{it} + \beta_3 \text{Log } PPSI_{it} + \beta_4 KP_{it} + \varepsilon_{it}$$

di mana :

JMS	= Jumlah Masyarakat Sejahtera (Juta Jiwa)
PPSP	= Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (Miliar Rupiah)
PPSK	= Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (Miliar Rupiah)
PPSI	= Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrestruktur (Miliar Rupiah)
KP	= Ketimpangan Pendapatan (%)
β_0	= Konstanta
$\beta_1 \dots \beta_4$	= Koefisien Regresi Variabel Independen
Log	= Operasi Logaritma
i	= <i>Cross Section</i> (34 Provinsi di Indonesia)
t	= <i>Time Series</i> (Periode 2018-2021)
ε	= <i>Error term</i> (Faktor Kesalahan)

Data yang dipakai bersumber dari Kementrian Keuangan Indonesia (KEMENKEU) dan Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS). Data penelitian ini merupakan data panel, yaitu kombinasi dari data time series dan data cross section. Data cross section meliputi 34 provinsi di Indonesia, data time series meliputi tentang pengamatan 2018-2021. Data yang digunakan meliputi data pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Ketimpangan Pendapatan, Jumlah Masyarakat sejahtera (jumlah penduduk dikurangi jumlah penduduk miskin). Tahap estimasi regresi data panel meliputi: estimasi parameter model ekonometrik dengan pendekatan *Pooled Least Square (PLS)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*; pemilihan model terestimasi terbaik dengan uji Cow dan uji Hausman dan jika diperlukan Uji Lagrange Multiplier; uji kebaikan pada model terestimasi yang terpilih; uji validitas pengaruh variabel independen pada model terestimasi terpilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Estimasi

Hasil estimasi model ekonometrik Regresi Data Panel dengan menggunakan pendekatan *Pooled Least Square (PLS)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)* dapat dilihat pada tabel 1.1.

Uji Pemilihan Model Terestimasi

Uji Chow dan uji Hausman digunakan untuk memilih model terestimasi terbaik antara *Pooled Least Square (PLS)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*. Apabila pada Uji Chow model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model (FEM)* dan pada Uji Hausman model yang terpilih juga *Fixed Effect Model (FEM)* maka model terestimasi terbaik adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

Tabel 1.1
Hasil Estimasi Model Ekonometrik Regresi Data Panel - Cross Section

Variabel	Koefisien Regresi		
	CEM	FEM	REM
<i>C</i>	-13.53384	17.02780	13.25286
<i>logPPSP</i>	1.223229	-0.069503	0.048064
<i>logPPSK</i>	-0.107702	0.015748	0.016191
<i>logPPSI</i>	-0.101223	0.004884	0.000318
<i>KP</i>	-0.464305	-0.822115	0.225965
<i>R</i> ²	0.828309	0.998517	0.039118
<i>Adjusted R</i> ²	0.823066	0.997957	0.009778
Statistik <i>F</i>	157.9993	1783.258	1.333268
Prob. Statistik <i>F</i>	0,000000	0,000000	0,260982
Uji Pemilihan Model			
(1) Chow			
Cross-section $F(33,98) = 0,0000$; Prob. $F(33) = 0,0000$			
(2) Hausman			
Cross section random Chi-Sq stat(4) = 237.661222; Prob. Chi-Sq(4)= 0,0000			

Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang terestimasi antara CEM atau FEM. H_0 pada uji Chow akan menyatakan bahwa model terestimasi adalah *Common Effect Model* (CEM), dan H_A pada Uji Chow akan menyatakan bahwa model terestimasi adalah *Fixed Effect Model* (FEM) dengan ketentuan apabila nilai probabilitas Prob $F > 0,10$ maka H_0 tidak diterima dengan kesimpulan model yang terpilih adalah *Common Effect Model* (CEM) sedangkan apabila nilai probabilitas Prob. $F < 0,10$ maka H_0 ditolak dengan kesimpulan model terpilih *Fixed Effect Model* (FEM).

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa hasil Uji Chow yaitu pengaruh Jumlah Masyarakat Sejahtera terhadap Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Ketimpangan Pendapatan menunjukkan nilai prob.F sebesar 0,0000 ($< 0,10$), sehingga H_0 ditolak dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model yang terestimasi antara FEM atau REM. H_0 pada Uji Hausman menyatakan bahwa model terestimasi adalah *Fixed Effect Model* (FEM), dan H_A pada Uji Hausman menyatakan bahwa model terestimasi adalah *Random Effect Model* (REM). Model terestimasi dengan ketentuan apabila nilai probabilitas Prob Chi-Sq $> 0,10$ maka H_0 diterima dengan kesimpulan model terestimasi yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM), sedangkan apabila nilai probabilitas Prob Chi-Sq $< 0,10$ maka H_0 ditolak dengan kesimpulan model terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa hasil Uji Hausman yaitu Pengaruh Jumlah Masyarakat Sejahtera terhadap Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Ketimpangan Pendapatan menunjukkan nilai Prob Chi-Sq sebesar 0,0000 ($< 0,10$) sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Dari Uji Chow dan Uji Hausman dapat terlihat jika *Fixed Effect Model* (FEM) terpilih sebagai model dengan estimasi terbaik. Hasil estimasi lengkap model *Fixed Effect Model* (FEM) dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3.

Tabel 1.2
Model Estimasi *Fixed Effect Model* (FEM)

$\log JMS_{it} = 17.02780 - 0.069503 \log PPSP_{it} + 0.015748 \log PPSK_{it} +$			
$0.004884 \log PPSI_{it} - 0.822115 KP_{it}$			
	(0,0076) **	(0,0773) ***	
(0,4386)	(0,0684) ***		
$R^2 = 0,83516; DW = 0,77236; F = 13,29962; \text{Prob. } F = 0,0000$			

Sumber: Lampiran 1. **Keterangan:** *Signifikan pada $\alpha = 0,01$; **Signifikan pada $\alpha = 0,05$; ***Signifikan pada $\alpha = 0,10$; Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai statistik t.

Uji Kebaikan Model

Uji Eksistensi Model Terestimasi REM

Model eksis ketika setidaknya satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (tidak semua koefisien regresi bernilai nol). Uji eksistensi model adalah uji F . Karena variabel independen dalam model ekonometrik ada empat, maka formulasi hipotesisnya: $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ (koefisien regresi semua nol atau model tidak eksis); $H_A: \beta_1 \neq 0 \vee \beta_2 \neq 0 \vee \beta_3 \neq 0$ (setidaknya satu koefisien regresi tidak sama dengan nol atau model eksis). H_0 akan diterima jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik $F > \alpha$; H_0 akan ditolak jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik $F \leq \alpha$.

Dari Tabel 1.2, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik F bernilai 0,0000 ($< 0,10$); jadi H_0 ditolak. Simpulan, model terestimasi *Fixed Effects Model* (FEM) eksis.

Interpretasi Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan daya ramal akan model terestimasi. Dari Tabel 1.4 dapat dilihat besar nilai R^2 sebesar 0,9985, artinya 99,85% yang artinya variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Ketimpangan Pendapatan dapat dijelaskan oleh variabel Jumlah Masyarakat Sejahtera. Sisanya 0,15% dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Tabel 3
Efek dan Konstanta Wilayah

No	PROVINSI	Effect	Konstanta Baru
1	Aceh	0.11597	17.14377
2	Sumatera Utara	1.237722	18.265522
3	Sumatera Barat	0.226587	17.254387
4	Riau	0.439475	17.467275
5	Jambi	-0.227859	16.799941
6	Sumatera Selatan	0.630949	17.658749
7	Bengkulu	-0.904624	16.123176
8	Lampung	0.649334	17.677134
9	Kepulauan Bangka Belitung	-1.190786	15.837014
10	Kepulauan Riau	-0.736602	16.291198
11	DKI Jakarta	1.093539	18.121339
12	Jawa Barat	2.607195	19.634995
13	Jawa Tengah	2.168552	19.196352
14	DI Yogyakarta	-0.084674	16.943126
15	Jawa Timur	2.307742	19.335542
16	Banten	1.140706	18.168506
17	Bali	0.077758	17.105558
18	Nusa Tenggara Barat	0.151221	17.179021
19	Nusa Tenggara Timur	0.09208	17.11988
20	Kalimantan Barat	0.174884	17.202684
21	Kalimantan Tengah	-0.481765	16.546035
22	Kalimantan Selatan	-0.048838	16.978962
23	Kalimantan Timur	-0.15386	16.87394
24	Kalimantan Utara	-1.927148	15.100652
25	Sulawesi Utara	-0.505105	16.522695
26	Sulawesi Tengah	-0.462953	16.564847
27	Sulawesi Selatan	0.812388	17.840188
28	Sulawesi Tenggara	-0.479018	16.548782
29	Gorontalo	-1.362441	15.665359
30	Sulawesi Barat	-1.211745	15.816055
31	Maluku	-1.019175	16.008625
32	Maluku Utara	-1.309478	15.718322
33	Papua Barat	-1.562804	15.464996
34	Papua	-0.257228	16.770572

Sumber: Lampiran 1, diolah

Uji Validitas Pengaruh Model Terestimasi *FEM*

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen secara sendiri-sendiri. Uji validitas pengaruh memakai uji t . H_0 uji $t @ i = 0$: variabel independen ke i tidak memiliki pengaruh signifikan; H_A -nya $@ \neq 0$: variabel independen ke i memiliki pengaruh signifikan. H_0 akan diterima jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik $t > \alpha$; H_0 akan ditolak jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik $t \leq \alpha$. Hasil uji validitas pengaruh dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen

Variabel	Sig. t	Kriteria	Kesimpulan
<i>logPPSP</i>	0,0076	< 0,05	Signifikan pada $\alpha = 0,05$
<i>LogPPSK</i>	0,0773	< 0,10	Signifikan pada $\alpha = 0,10$
<i>LogPPSI</i>	0,4386	> 0,01	Tidak Signifikan
<i>KP</i>	0,0684	< 0,10	Signifikan pada $\alpha = 0,10$

Sumber: Lampiran 1, diolah

Interpretasi Pengaruh Variabel Independen

Berdasarkan uji validitas pengaruh pada Tabel 4.4, dapat dilihat terdapat tiga variabel independen, yaitu variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PPSP), Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (PPSK), dan Ketimpangan Pendapatan (KP).

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap Jumlah Masyarakat Sejahtera. Dapat diartikan bahwa apabila semakin besar Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan disuatu daerah maka nilai Jumlah Masyarakat Sejahtera semakin menurun. Nilai dari variabel Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan memiliki koefisien regresi sebesar -0,069503 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0076 yang berarti Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh negatif terhadap Jumlah Masyarakat Sejahtera. Pola kedua hubungan antara kedua variabel tersebut yaitu logaritma logaritma. Sehingga dapat diartikan jika Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan naik sebesar 1%, maka Jumlah Masyarakat Sejahtera akan turun sebesar 0,069503 atau sebesar 0,069%. Begitu pula sebaliknya, apabila pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan turun sebesar 1%, maka Jumlah Masyarakat Sejahtera akan naik sebesar 0,069503 atau sebesar 0,069%. Jika Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan semakin naik maka Jumlah Masyarakat Sejahtera akan semakin menurun di Indonesia.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan memiliki pengaruh Positif terhadap Masyarakat Sejahtera. Dapat diartikan bahwa apabila semakin besar Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan disuatu daerah maka Jumlah Masyarakat Sejahtera semakin meningkat. Nilai variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan memiliki koefisien regresi sebesar 0,015748 dengan nilai probabilitas 0,0773 yang berarti Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh positif terhadap Jumlah Masyarakat Sejahtera. Pola kedua hubungan antara kedua variabel tersebut yaitu logaritma logaritma. Sehingga dapat diartikan jika Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan naik sebesar 1%, maka Jumlah Masyarakat Sejahtera akan naik sebesar 0,015748 atau sebesar 0,015%. Jika Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan semakin naik maka Jumlah Masyarakat Sejahtera akan semakin meningkat juga di Indonesia.

Ketimpangan Pendapatan memiliki pengaruh negatif terhadap Jumlah Masyarakat Sejahtera. Dapat diartikan bahwa apabila semakin besar Ketimpangan Pendapatan disuatu daerah maka Jumlah Masyarakat Sejahtera semakin menurun. Nilai variabel Ketimpangan Pendapatan memiliki koefisien regresi sebesar -0,822115 dengan nilai probabilitas 0,0684 yang berarti Ketimpangan Pendapatan berpengaruh negatif terhadap Jumlah Masyarakat Sejahtera. Pola kedua hubungan antara kedua variabel tersebut yaitu logaritma linier. Sehingga dapat diartikan jika Ketimpangan Pendapatan naik sebesar 1%, maka Jumlah Masyarakat Sejahtera akan turun sebesar 0,822115 atau sebesar 0,822%. Begitu pula sebaliknya, apabila Ketimpangan Pendapatan turun sebesar 1%, maka Jumlah Masyarakat Sejahtera akan naik sebesar 0,822115 atau sebesar 0,822%. Jika Ketimpangan Pendapatan semakin naik maka Jumlah Masyarakat Sejahtera akan semakin menurun di Indonesia.

Interpretasi Ekonomi

Jumlah Masyarakat Sejahtera di 34 Provinsi di Indonesia pada periode 2018-2021 ternyata terdapat tiga variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Jumlah Masyarakat Sejahtera yaitu Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, dan Ketimpangan Pendapatan, sedangkan variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur tidak berpengaruh terhadap Jumlah Masyarakat Sejahtera.

Pengaruh positif pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengaruh negatif ketimpangan pendapatan terhadap jumlah masyarakat sejahtera ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis sebelumnya yang menyatakan bahwa ketika pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mengalami peningkatan maka jumlah masyarakat sejahtera di suatu daerah juga akan mengalami peningkatan. Hal tersebut membuktikan bahwa kebijakan pemerintah terkait jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk kesehatan telah mampu meningkatkan kesehatan di 34 provinsi di Indonesia. Hal ini merupakan sebuah komponen penting dalam meningkatkan sumber daya manusia terutama dalam hal kualitas yang akan meningkatkan produktivitas maupun dalam ekonomi akan membuat daya saing antar negara semakin meningkat. Sedangkan ketika ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan maka jumlah masyarakat sejahtera akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan dalam masyarakat terdapat beberapa kelompok pendapatan seperti kelompok pendapatan atas, menengah, rendah sehingga jika ketimpangan ini terjadi akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap Jumlah Masyarakat Sejahtera. Seperti dalam para pelaku ekonomi dapat melakukan tindakan yang akan mengganggu stabilitas ekonomi dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Perekonomian yang baik pada umumnya mempunyai ketimpangan pendapatan yang relatif rendah, yang berarti bahwa perkembangan ekonomi di sebuah negara akan melibatkan peran masyarakat di negara tersebut.

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah masyarakat sejahtera, hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa semakin tinggi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan maka jumlah masyarakat sejahtera akan meningkat, tanda negatif pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap jumlah masyarakat sejahtera menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan akan menurun di 34 provinsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam pengalokasian dana atau anggaran belanja pemerintah di sektor pendidikan kurang dalam penyaluran atau penyebaran di setiap program-program pendidikan yang dibuat oleh pemerintah, seperti penyebaran sarana pendidikan yang tidak merata terutama di daerah ataupun wilayah terpencil di Indonesia. Sehingga tujuan dari sistem pendidikan kurang tercapai dengan baik dan akan menyebabkan kurangnya lulusan yang kurang kreativitas maupun inovasi yang akan berakibat juga pada sumberdaya manusia dan akan mengganggu perkembangan dalam perekonomian Indonesia.

Pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur memiliki pengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap jumlah masyarakat sejahtera. Artinya tidak ada pengaruh pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap jumlah masyarakat sejahtera, tanda positif menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur akan meningkatkan jumlah masyarakat sejahtera di Indonesia. Dalam pembangunan infrastruktur di berbagai daerah dapat menarik investor untuk berinvestasi dan akan membutuhkan tenaga kerja. Hal ini menandakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur akan menciptakan kesempatan kerja secara tidak langsung yang akan meningkatkan jumlah masyarakat sejahtera. Seperti pembangunan akan infrastruktur jalan yang memadai akan mempermudah kinerja ekonomi serta kegiatan sosial masyarakatnya. Namun, pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur pada tahun 2018-2021 masih rendah dalam menaikkan jumlah masyarakat sejahtera di 34 provinsi di Indonesia karena masih minimnya pembangunan infrastruktur antar wilayah dan pembangunan akan infrastruktur masih

fokus di kota-kota besar sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan yang akan berdampak pada jumlah masyarakat sejahtera di pedesaan. Hal ini dikarenakan pemerintah hanya menyediakan fasilitas yang bersifat kompleks untuk daerah perkotaan, sehingga masyarakat di pedesaan akan membutuhkan waktu untuk menikmati akses maupun fasilitas tersebut. Sedangkan salah satu cara untuk meningkatkan jumlah masyarakat sejahtera yaitu dengan pembangunan infrastruktur yang merata. Pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur memiliki masa jangka yang panjang sehingga pembangunan infrastruktur akan dirasakan dalam jangka waktu panjang. Pembangunan suatu daerah dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari kesejahteraan tercapai.

Hasil penelitian ini juga di dukung dengan teori keynes yang menyatakan bahwa untuk mengatasi masalah maupun hambatan dalam ekonomi pemerintah harus ikut campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat agar lebih terealisasi pengeluarannya yang berguna untuk kelangsungan hidup masyarakat. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Chairati Fadliyah Mike Triani (2019) yang menyatakan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap kesejahteraan masyarakat adalah positif, pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat adalah negatif dan pengaruh pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat adalah positif. Sedangkan menurut I Gede Wiriana dan I Nengah Kartika (2020) menemukan bahwa pengaruh disparitas pendapatan atau ketimpangan pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat adalah negatif dan signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan hasil penelitian dapat diambil penelitian sebagai berikut:

1. Hasil uji pemilihan model estimator terbaik dalam model penelitian ini membuktikan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model terpilih dengan variabel dependen jumlah masyarakat sejahtera dengan variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketimpangan pendapatan.
2. Berdasarkan uji kebalikan model pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketimpangan pendapatan dengan model terpilih *Fixed Effect Model* (FEM) diketahui bahwa nilai R^2 sebesar 0,9985 atau 99,85% artinya variasi variabel pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan oleh variabel jumlah masyarakat sejahtera. Sisanya 0,15% dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
3. Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan (Uji F) diketahui bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketimpangan pendapatan terhadap jumlah masyarakat sejahtera model terpilih *Fixed Effect Model* (FEM) eksis pada $\alpha 0,10$.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai konstanta tertinggi adalah provinsi Jawa Barat dengan nilai konstanta sebesar 16,634995 dan nilai konstanta terendah adalah Kalimantan Utara dengan nilai konstanta sebesar 15,10065.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, N. M. A. and Dewi, N. P. M. (2018) 'Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan di Provinsi Bali', *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 7(2), pp. 212–242.
- Aidar, N. and Muhajir (2014) 'Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Perkapita di Provinsi Aceh', *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 1(2), pp. 70–78.
- Anshari, M., Azhar, Z. and Ariusni (2018) 'Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum

- Provinsi, dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia', *Jurnal Ecogen*, 1(3). doi: <http://dx.doi.org/10.24036/jmpe.v1i3.4990>.
- Arif, M. and Wicaksani, R. A. (2017) 'Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya', *University Research Colloquium*, pp. 323–328.
- Astri, M., Nikensari, S. I. and Kuncara W., H. (2013) 'Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehata Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (JPEB)*, 1(1), p. 77. doi: 10.21009/jpeb.001.1.5.
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Fadilah, A., Ananda, C. F. and Kaluge, D. (2018) 'A Panel Approach: How Does Government Expenditure Influence Human Development Index?', *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 10(2), pp. 130–139.
- Fadliyah, C. and Triani, M. (2019) 'Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia', *Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), pp. 789–796. doi: <http://dx.doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7706> DOI: <http://dx.doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7706>.
- Fiuna, Y., Susetyo, D. and Yunisyita (2017) 'The Effect of Government Expenditure Education , Health and Minimum Wages on Human Development Index of Five Sumatera in South Part Provinces', *Saudi Journal of Economics and Finance (SJEf)*, 9414, pp. 257–262.
- Hindun, H., Soejoto, A. and Hariyati, H. (2019) 'Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 8(3), pp. 250–265. doi: 10.26418/jebik.v8i3.34721.
- Illahi, F. M. and Ariusni, A. (2020) 'Pengaruh Fasilitas Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai', *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 2(2), pp. 55–60. doi: 10.24036/jkep.v2i2.8967.
- Juoro, Umar. (2013). 'Monetary Policy Model for Open Economy of Indonesian'. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Bank Indonesia
- Mahendra, A. (2020) 'Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan, Inflasi Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Di Indonesia', *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 20(September), pp. 174–186. doi: 10.54367/jmb.v20i2.1010.
- Mirza, D. S. (2012). 'Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009'. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Semarang*.
- Mogan, J. J. S. (2019) 'Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Mnsusia di Indonesia', *Indonesia Treasury Review Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publikj*, 4(2), pp. 163–176.
- Petcu, C. (2014). 'Does Educational Inequality Explain Income Inequality Across Cauntries? '
- Putri, S. D., Anis, A. and Triani, M. (2019) 'Pengaruh Ketenagakerjaan, Pengeluaran Pemerintah, dan Infrastruktur Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia', *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembnaganan*, 1(3), pp. 739–750.
- Rakhmawati, I. and Atikah, S. (2019) 'Do expenditures of education, health, and infrastructure improve human resources quality?', *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 13(7), pp. 4733–4744.
- Safitri, I. (2016) 'Pengaruh Pengeluaran Pemerintah SEktor Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 1(1), pp. 66–76.
- Sholihah, F. and Kustanti, M. (2017) 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo', *Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama "Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional Dalam*

Rangka Menghadapi Persaingan Global”, pp. 94–105.

Sope, I. I., Koleangan, R. A. M. and Wauran, P. C. (2019) ‘ Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara’, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(01), pp. 99–109.

Sukirno, S. (2010). 'Makro Ekonomi Teori Pengantar (Ketiga)'. PT. Raja Grafindo Persada.

Tjodi, A. M., Rotinsulu, T. O. and Kawung, G. M. . (2018) ‘Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi di Provinsi Sulawesi Utara)’, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(4).

Wiriana, I. G. and Kartika, I. N. (2018) ‘Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2012 - 2018’, *E-Jurnal EP Unud*, 9[5](3), pp. 1051–1081.

Todaro, Michael P & Smith, Stephen C. (2006). 'Pembangunan Ekonomi. Edisi ke 9'. Jakarta: Erlangga.

Todaro, Michael P & Smith, Stephen C. (2016). 'Economic development: The Addison-Wesley Series in Economics'.